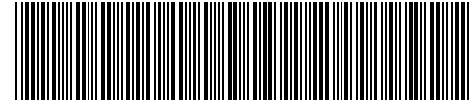




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408779/2023**



DS:5004-9650-4813-8270

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 4. Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
- Sebesar : Rp. 3.397.892.000 (TIGA MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.397.892.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 3.397.892.000

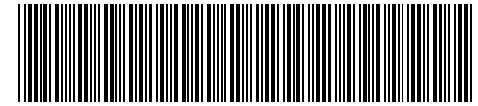
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023

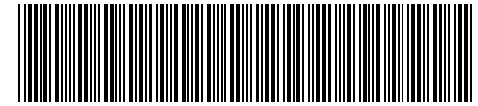


DS:5004-9650-4813-8270

Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	134.063.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	134.063.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.263.829.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	3.263.829.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			134.063.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			134.063.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	51.119.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	51.119.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	82.944.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	82.944.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.263.829.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			3.263.829.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	155.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	136.300.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	18.700.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		30,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	118.649.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	30,00	Lembaga	118.649.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	88.690.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	layanan	83.430.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	layanan	5.260.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		300,00	Orang	2.400.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	300,00	Orang	2.400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		47,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	501.490.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	47,00	Kegiatan	501.490.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

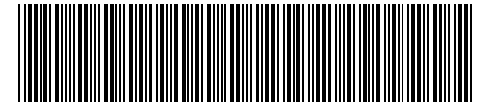
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5004-9650-4813-8270

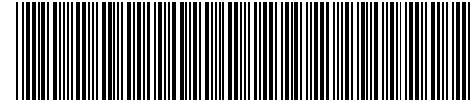
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	3.397.892.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.397.892.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	3.397.892	-	-	-	3.397.892		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	134.063	-	-	-	134.063		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	134.063	-	-	-	134.063		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	51.119	-	-	-	51.119	19.51	
01	RM	-	51.119	-	-	-	51.119	136	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	82.944	-	-	-	82.944	19.51	
01	RM	-	82.944	-	-	-	82.944	136	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.263.829	-	-	-	3.263.829		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	3.263.829	-	-	-	3.263.829		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	155.000	-	-	-	155.000	19.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	155.000	-	-	-	155.000	136	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	118.649	-	-	-	118.649	19 . 51	
01 RM		-	118.649	-	-	-	118.649	136	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	88.690	-	-	-	88.690	19 . 51	
01 RM		-	88.690	-	-	-	88.690	136	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	19 . 51	
01 RM		-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	136	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	501.490	-	-	-	501.490	19 . 51	
01 RM		-	501.490	-	-	-	501.490	136	
JUMLAH		-	3.397.892	-	-	-	3.397.892		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (408779) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	300	317.859	209.110	498.608	460.050	347.340	416.375	122.105	408.365	354.475	263.005	300	3.397.892
		BELANJA BARANG	300	317.859	209.110	498.608	460.050	347.340	416.375	122.105	408.365	354.475	263.005	300	3.397.892
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	1.049	0	2.644	0	13.175	19.595	19.555	29.150	21.520	27.375	0	134.063
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.049	0	2.644	0	13.175	19.595	19.555	29.150	21.520	27.375	0	134.063
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	300	316.810	209.110	495.964	460.050	334.165	396.780	102.550	379.215	332.955	235.630	300	3.263.829
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	300	316.810	209.110	495.964	460.050	334.165	396.780	102.550	379.215	332.955	235.630	300	3.263.829

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

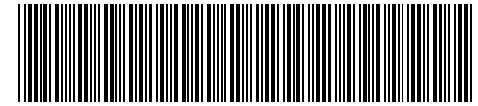
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408779/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5004-9650-4813-8270

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [408779] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001